

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengendalian internal yaitu suatu cara untuk menjaga aset suatu perusahaan dari penyalahgunaan, meyakinkan dan menjamin informasi-informasi dari perusahaan disajikan akurat dan mengikuti ketentuan dari hukum (peraturan) dan Undang-undang yang berlaku. Maksud adanya ketentuan tersebut yaitu peraturan di bidang-bidang terkait seperti perpajakan, pasar modal, hukum komersial dan hukum anti korupsi.¹ Pengendalian internal yang dimaksudkan oleh Mulyadi adalah mengelola susunan terkait pada wadah, cara, menjaga aset organisasi, memeriksa kesalahan memverifikasi keakuratan, memberikan kepercayaan, efisiensi mengenai laporan hasil keuangan dan untuk menaati prosedur yang dibuat oleh manajer.² Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) juga memberikan pendapatnya mengenai Pengendalian internal yaitu suatu sistem yang terdapat pimpinan lembaga direksi, manajer dan beberapa pengurus lain yang bekerja untuk sebuah entitas dan dibentuk agar mendapatkan yang cukup mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai termasuk dalam kategorinya: kemampuan dan ketepatan proses, kepercayaan informasi akuntansi, ketaatan mengenai ketentuan dan aturan yang berjalan agar mengamankan harta.³ Efektivitas pengendalian internal bisa membuat dan membuktikan pencatatan hasil laporan pembukuan yang bersifat dengan valid, dan kredibilitas. Maka dalam hal ini dimungkinkan untuk membuat informasi keuangan berkualitas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Adanya pengendalian internal bertujuan yang dapat mempertahankan kredibilitas dikarenakan pada hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap hasil kualitas dari hasil laporan keuangan secara efisien dan juga bisa mengurangi adanya kelalaian-kelalaian yang berhubungan dalam proses data akuntansi, menjamin atau menahan terjadinya penipuan atau penggelapan-penggelapan. Menurut COSO ada beberapa komponen dalam pengendalian internal yang dirancang dan diterapkan bagi manajer agar meyakinkan mengenai sasaran pengendalian. Ada lima bagian mengenai pengendalian internal adalah: lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan

¹Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 12

²Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 129

³Arfan Ikhsan, et. al., *Auditing : Pemeriksaan Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2018), h. 202

pemantauan.⁴

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap, persepsi, dan sikap pimpinan lembaga direksi, manajer, pengurus lain terhadap perlunya pengendalian ini. Kegiatan ini adalah dasar dari ketaatan pada mengenai semua bagian. Penilaian resiko adalah meneliti, mengecek, dan menganalisis, dan manajemen resiko yang berhubungan terhadap pembuatan hasil laporan keuangan yang disajikan proposional yang berhubungan dengan ketentuan SAK yang diatur. Aktivitas pengendalian adalah cara dan prosedur yang dibuat oleh manajemen diharapkan dapat menerapkan. Cara dan prosedur ini memastikan bahwa langkah-langkah yang dibutuhkan sudah dilakukan agar memperkecil kekurangan yang terjadi dalam meraih tujuan. Informasi dan komunikasi adalah bagian-bagian yang dibutuhkan terkait pada pelaksanaannya. Manajemen membutuhkan informasi tentang lingkungan, penilaian resiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan dalam menjalankan usahanya, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang diatur pada suatu entitas. Yang dimaksud pemantauan adalah identifikasi atau membuat evaluasi mutu kapasitas masing-masing yang terkait mengenai pengelolaan internal yang berjalan. Pemantauan yang dilaksanakan pada pengendalian internal untuk mendeteksi kelemahan dan memajukan kemampuan dari pengendalian. Terkait pengelolaan ini bisa dipantau dengan baik dengan melakukan evaluasi khusus yang diupayakan.

Dalam penyusunan laporan keuangan dipengaruhi dari beberapa indikator. Salah satunya yaitu pengendalian internal. Laporan keuangan yang dikatakan berkualitas adalah hasil laporan yang sudah dibuat bisa menunjukkan isi di dalamnya mengenai transaksi atau informasi secara valid dan reliabel. Kualitas pelaporan keuangan sangat membantu bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan keuangan.⁵ Jika isi laporan di dalamnya mudah dimengerti, mencukupi kepentingan oleh pemakainya untuk menetapkan pendapat, tidak ada pemahaman yang menyimpang, dan tidak terdapat kesalahan penyajian, dan bisa dipercayai maka laporan ini mempunyai kualitas baik maka hasil pelaporan ini bisa menjadi pertimbangan oleh laporan keuangan yang lalu.

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang dibuat oleh pemerintah Indonesia

⁴*Ibid.*, h. 203

⁵Emilda Ihsanti, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerepan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2014), h. 12

yang berasaskan gotong royongan.⁶ Koperasi berdiri pertama kali di Indonesia pada tahun 1895. Pada Undang-undang nomor 17 tahun 2012 yang memperbaharui dari undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pembaharuan, menyatakan bahwa disebut badan institusi seperti organisasi yang di dalamnya usaha berupa perniagaan dengan efektif, independen, energik dan perkasa dengan segala aktivitasnya berdasarkan pada mutu asas dan pokok organisasinya. Koperasi Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan yang untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan ini tidak semata-mata untuk keinginan mencari profit. Jadi maksudnya yaitu mempunyai keindepeden dan produktivitas yang mempunyai kemampuan yang dimiliki didasarkan kesamaan pada masyarakat madani atau *civil society*.

Koperasi mempunyai tujuan yaitu memupuk dan meningkatkan kompetensi ekonomi masyarakat, untuk mencapai kehidupan demokrasi yang bercirikan demokratis, persatuan, solidaritas dan keterbukaan. Semua masyarakat Indonesia dapat menjadi bagian dari kepemilikan koperasi dan seluruh anggota koperasi termasuk pemilik koperasi sehingga dalam hal ini kerugian dan keuntungan ditanggung bersama-sama oleh seluruh anggota koperasi. Koperasi sebagai tempat bagi setiap anggotanya untuk mendapat simpanan yang dalam bentuk berupa pemberian untuk membuat usaha pemberian untuk barang atau rumah maupun pinjaman uang tunai. Pemberian yang ditawarkan olehkoperasi ini sebagai produk inti yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan pada sebuah koperasi.⁷ Di Indonesia yang paling terkenal adalah koperasi simpan pinjam telah menghadapi banyak persoalan yaitu terkait pada tata laksana pada hasil pelaporan keuangan yang menyebabkan kerugian koperasi terdapatnya kecurangan dilakukan oleh pengurus atau pimpinan di dalam koperasi. Dengan adanya kejadian ini memberitahukan pada tata laksana untuk hasil pelaporan keuangan wajib memegang dengan kualitas pembukuan dari pelaporan keuangan.

Hal yang menjadi pasal dari rendahnya kualitas laporan keuangan koperasi salah satunya yaitu rendahnya wawasan dari standar yang berlaku yaitu Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) oleh pengurus koperasi. Prosedur kegiatan akuntansi hingga menghasilkan hasil akuntansi yakni laporan keuangannya dapat berguna hendak berdasarkan oleh asas dan aturan pembuatan

⁶M.Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2017), h. 80.

⁷Yendra Juniardo Simanjuntak, "*Sistem Pengendalian Intern Piutang pada Koperasi Pegawai Negeri Murni Tiga Balata*" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, 2017), h.1

hasil laporan akuntansi berlaku pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP dipakai pada lembaga organisasi yang bukan mempunyai akuntabilitas publik signifikan yang pada contohnya UMKM dan koperasi. Menetapkan di Peraturan Menteri Negara KUKM RI Nomor: 04/PER/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Berbasis Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Pelaksanaan SAK-ETAP bisa menerapkan dasar keterbukaan dan tanggung jawab yang bisa dinyatakan, disetujui dan dimengerti. Dalam hal ini, SAK-ETAP di koperasi mengutamakan pengetahuan mengenai SAK-ETAP. Faktor selanjutnya dapat menjadi bisa penyebab rendahnya kualitas hasil laporan keuangan adalah pengendalian internal. Pada hal ini pengendalian internal adalah kriteria yang wajib di perkuat dalam penyusunan laporan keuangan.

Dinas koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah pelaksana bagi kementerian koperasi yang menyelenggarakan urusan dalam bagian pengkoperasian usaha kecil dan menengah dan melakukan aktivitas terkait dengan ruang lingkupnya. Dalam hal ini penyelenggaraan mengenai usaha kecil dan menengah merupakan bagian kerja dari pengaturan tugas koperasi. Dinas Koperasi dan UKM juga terdapat bagian Inspektorat Koperasi (INSKO) yaitu koperasi bagi para pegawai negeri sebagai anggotanya. Fenomena yang terjadi di Koperasi INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang hingga sekarang tidak menggunakan SAK ETAP di dalam proses pembuatan hasil laporan keuangannya dan penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual belum terkomputerisasi.⁸ Masalah yang terjadi bendahara melakukan kesalahan dengan kelebihan pencatatan pada biaya honor pengurus pada penyusunan laporan keuangan sebesar Rp.800.000.⁹ Maka dari itu diharuskan untuk adanya pemisahan tugas seperti fungsi kredit dan kasir dimana KPRI INSKO menggabungkan kedua fungsi ini sehingga dilakukan oleh seorang bendahara saja. Dalam hal ini kemungkinan bisa terjadi penyalahgunaan wewenang profesi yang dapat menyebabkan penyelewangan uang kas atau kesalahan dalam menyusun transaksi yang menyebabkan berlebihan uang kas yang dikeluarkan pemakaian kasnya mengakibatkan penggunaan beroperasi tidak efektif. Maka mengenai persoalan tersebut dibutuhkan adanya suatu pemantauan atau pengawasan adminstrasi yang efektif agar menghindari resiko tersebut.

⁸Ishak, Manajer KPRI INSKO, wawancara di Medan, tanggal 2 Agustus 2021

⁹Buku Laporan Pertanggung jawaban KPRI INSKO Tahun 2020

Tabel 1.1
Laporan Hasil Usaha Simpan Pinjam
Koperasi INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
Periode 2018-2020

Keterangan	2018	2019	2020
Pemberian pinjaman	Rp.1.927.801.000	Rp.1.686.925.000	Rp. 1.651.650.000
Pendapatan	Rp.253.560.198	Rp.291.923.307	Rp. 240.246.380
Beban Operasional	Rp.167.790.000	Rp.156.217.000	Rp.141.489.200

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Buku 2020

Pada tabel di atas pemberian pinjaman pada tahun 2020 mengalami penurunan pemberian pinjaman dari tahun sebelumnya sebesar -2,1%. Pendapatan unit simpan pinjam juga mengalami penurunan sebesar Rp.51.676.927 atau -17,70%. Beban operasional mengalami penurunan sebesar Rp. 14.727.800 atau -9,43%. Dari tabel di atas menarik perhatian peneliti bahwasannya akibat besarnya piutang macet, dikarenakan anggota tidak membayar simpan pinjamnya dengan tepat waktu, sehingga dalam hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan koperasi, berarti dalam hal ini sistem pengendalian internal di KPRI INSKO masih dikatakan rendah sehingga masih harus ditingkatkan lagi. Keadaan atau fenomena yang dijelaskan peneliti tentu mengenai sepenuhnya ataupun tidak sepenuhnya bisa menyebabkan pengaruh terhadap hasil laporan keuangan yang berkualitas di KPRI INSKO.

Menurut penelitian dari Anisah Hana Pratiwi yang berjudul "*Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus pada Citi Global Group di Pekanbaru)*". Hasil penelitiannya mengkhiktisarkan bahwa, secara simultan variabel lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantuan berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan.

Menurut penelitian dari Nurendah Ragillita Untary, Moh Didik Ardiyanto yang berjudul "*Pengaruh Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi (Studi kasus pada Pemerintah Daerah*

Kabupaten Magelang) Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil pengendalian internal yang dikatakan bagus, jadi untuk hasil laporan keuangan bisa melengkapi sifat atau ide berisi penjelasan dalam membutuhkan agar melengkapi hasil laporan keuangan bisa berkualitas sehingga disajikan kualitas dari hasil laporan dan bisa memperoleh pendapatnya dengan wajar dan sesuai aturan yang berlaku.

Masalah yang disebutkan menarik perhatian peneliti dikarenakan ada perbedaan di variabel peneliti-peneliti sebelumnya, objek penelitiannya dan tahun penelitiannya. Penulis sebelumnya cuma melakukan objek di Pemerintahan Daerah dan perusahaan, dan kebanyakan hasilnya terdapat pengaruh pada pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan. Maka dikarenakan, peneliti terdorong agar meneliti mengenai dari pengendalian internal bisa mempengaruhi mengenai dari kualitas pelaporan keuangan di suatu koperasi. Jadi, peneliti terdorong untuk mengambil judul **“Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Inspektorat Koperasi (INSKO) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)”**

B. Identifikasi Masalah

Mengenai latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka diidentifikasi, yaitu:

1. Lemahnya sistem pengendalian internal akan mengakibatkan dampaknya kebangkrutan dalam suatu usaha.
2. Pentingnya dari komponen-komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, proses penilaian resiko entitas, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan pemantauan pada kualitas laporan keuangan.

C. Batasan Masalah

Mengenai identifikasi masalah yang disebutkan, penulis memberi batasan masalah hanya pada komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, proses penilaian resiko entitas, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada Koperasi INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)

D. Perumusan Masalah

Mengenai pada penjelasan yang disebutkan di latar belakang, jadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah proses penilaian resiko berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah aktivitas pengendalian resiko berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara?
5. Apakah pemantauan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara?
6. Apakah pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan pemantauan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Mengenai dari uraian dijelaskan, tujuan dilakukan yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
- b. Untuk mengetahui apakah proses penilaian resiko berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
- c. Untuk mengetahui apakah aktivitas pengendalian resiko berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

- d. Untuk mengetahui apakah informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
- e. Untuk mengetahui apakah pemantauan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
- f. Untuk mengetahui apakah lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan pemantauan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada KPRI INSKO Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis berharap memberikan manfaat, antara lain:

a. Mahasiswa/penulis

Sebagai bagian dari persyaratan mengenai penuntasan studi strata 1 jurusan Akuntansi syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan penelitian ini berharap bisa memberikan penambahan wawasan dan ilmu pengetahuan.

b. Bagi peneliti berikutnya

Penulis berharap bisa menjadi pengamatan dan penyeimbang dalam menambah daftar pustaka baru.

c. Bagi Koperasi INSKO Dinas Koperasi dan UKM

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atau informasi untuk kemajuan koperasi, dan sebagai referensi dan sumber inspirasi bahwa pengendalian internal sangat penting.

d. Bagi Pihak Lain/ Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan memberikan keterangan yang menggambarkan mengenai adanya pengaruh pada pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.